

LIBURAN KE LUAR KOTA SAAT AKHIR TAHUN

Wali Kota Bekasi Ancam Tunda Kenaikan Pangkat PNS

BEKASI (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengancam akan menunda kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) yang berpegangan ke luar kota ketika libur Natal dan Tahun Baru.

Para PNS diminta tidak bepergian ke luar kota untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19. "PNS kalau bandel (keluar kota) bisa ditahan kenaikan pangkatnya, bisa diberikan peringatan," ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat ditemui di kawasan Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (17/11).

Rahmat menghimbau agar seluruh PNS disiplin dengan aturan yang ada. "Ya memang ada tentang kedisiplinan pegawai kan ada, kalau ada yang seperti itu (PNS bandel cuti ke luar kota) ya tinggal tunggu aja sanksinya. Tapi kecil kemungkinan," ujarnya.

Rahmat melanjutkan, kebijakan tersebut dilakukan guna mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19 pascalibur panjang. Setiap pascalibur panjang, selalu terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. "Kalau aturan ya merayakan kegiatan ibadah Natal, ya silakan. Tapi tentunya kalau kegiatan ke luar kota satu dan lain hal, belajar dari kejadian tahun yang lalu kan ada transmisi (Covid-19) yang luar biasa," ujarnya.

"Untuk keliling di dalam kota enggak masalah, tapi kalau di luar kota bahkan sampai ke luar pulau, ya tolong dipikirkan, sebelum ada kebijakan dari pemerintah pusat," tambah dia.

Pemerintah pusat tengah menyiapkan kebijakan atau pengaturan khusus untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat libur Natal dan Tahun Baru. ● yan

Koramil 04 Pulogadung Bersama Nakes Giat Vaksin dari Rumah ke Rumah



JAKARTA (IM) - Upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayah RW.04, 07 Kelurahan Jatinegara Kaum, Koramil 04 Pulogadung Bersama Nakes, menyambangi warga yang Komorbid (struk) dan Disabilitas untuk Giat Vaksinasi dari rumah ke rumah, Rabu (17/11).

Danramil 04 Pulogadung, Kapten Inf Irwan Iryanto menyampaikan, guna tercapainya target kekebalan komunal Babinsa bersama Nakes Yusuf Mekanis 201 Jaya Yudha, Yonkav-7/PS dan perangkat RT/RW Dasawisma melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui vaksinasi yang langsung mendatangi satu persatu rumah warga yang belum vaksin, baik pasien Komorbid (struk) maupun penyandang Disabilitas untuk menerima suntik vaksin.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Koramil Pulogadung bersama Nakes dan perangkat RT/RW, Dasawisma dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi dari rumah ke rumah dengan tu-

juan seluruh warga tervaksin dengan pelayanan jemput bola terhadap warga masyarakat yang dengan kesibukannya belum mendapatkan pelayanan, sehingga dengan cara ini masyarakat dapat terlayani dengan baik secara keseluruhan.

"Kita berikan pelayanan jemput bola dari rumah ke rumah, sasaran masyarakat yang belum tervaksin, agar dapat mendapatkan pelayanan tentunya dalam hal ini pihak Nakes dalam pelayanannya tetap memeriksa kesehatan pasien yang belum vaksin melalui tensi darah, screening oleh dokter, apabila memenuhi syarat langsung diberikan suntik vaksin," ucap Danramil.

Kegiatan penyelenggaraan pelayanan vaksinasi yang digelar melalui jemput bola dari rumah ke rumah dengan target 150 orang di wilayah Kelurahan Jatinegara Kaum berjalan kondusif sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan menggunakan masker, tandasnya. ● ber

Peringati Maulid Nabi, Plt. Bupati Ajak Masyarakat Jadikan Ajaran Nabi Sebagai Teladan



Pemerintah Kabupaten Bekasi dan jajaran serta Forkopimda saat Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Bekasi 1443 H di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Selasa (16/11).

CIKARANG PUSAT (IM) - Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Bekasi 1443 H, yang berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pembak Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (16/11).

"Mari kita contoh akhlak Nabi Muhammad SAW, karena tujuan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ini hakikatnya adalah bagaimana kita dapat meneladani dan mengamalkan segala hal yang Nabi ajarkan," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (16/11) malam.

Plt. Bupati Bekasi me-

nyampaikan bahwa selain menjadi ajang silaturahmi, peringatan Maulid Nabi juga bisa menjadi sebagai ajang untuk bersyukur kepada Allah SWT karena telah mengutus suri tauladan bagi kita semua.

"Oleh karenanya melalui momentum ini, mari kita jadikan semangat kepedulian kepada sesama, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad," ujarnya.

Lebih lanjut, Marjuki juga mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, serta tidak lengah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah saat ini pandemi Covid-19 sudah mulai berangsur membaik, meski demikian tetaplah waspada dan berhati-hati untuk selalu menaati protokol kesehatan," ucapnya.

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



REVITALISASI JPO SUDIRMAN

Foto udara progres pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sudirman di Jakarta, Rabu (17/11). Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi JPO Sudirman dengan konsep menyerupai kapal pinisi yang dilengkapi jalur sepeda dan terintegrasi halte TransJakarta untuk mendukung program Jakarta ramah pejalan kaki dan ditargetkan selesai pada November 2021.

LEBIH BESAR RP 28 MILIAR DARI ANGGARAN RENOVASI SEKOLAH SE-JAKARTA

Dana Kunjungan Dapil DPRD DKI Rp49 Miliar

Di samping angkanya yang terlalu besar, urgensi kunjungan ke daerah pemilihan tidak diperlukan untuk anggota DPRD DKI. Pasalnya para wakil rakyat tersebut sudah berada di tengah-tengah masyarakat pemilihnya. Berbeda dengan anggota DPR-RI yang harus pulang kampung untuk menemui para pemilihnya.

JAKARTA (IM) - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyortir perbandingan anggaran kunjungan ke daerah pemilihan (dapil)

anggota DPRD DKI Jakarta senilai Rp 49 miliar.

Pasalnya, anggaran tersebut lebih besar Rp 28 miliar dibandingkan anggaran renovasi sekolah di DKI Jakarta

yang hanya dipos sebesar Rp 21 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2022.

"Kalau melihat perbandingan itu memang sudah timpang dan semakin menguatkan alasan betapa tidak pentingnya mendukung keinginan DPRD untuk dapatkan dana kunjungan ke dapil," ujar Lucius saat dihubungi melalui telepon, Rabu (17/11).

Dia bertutur, di samping angka yang terlalu besar, urgensi kunjungan ke daerah pemilihan tidak diperlukan untuk anggota DPRD DKI. Pasalnya para wakil rakyat tersebut sudah berada di tengah-tengah masyarakat pemilihnya, berbeda dengan anggota

DPR-RI yang harus pulang kampung untuk menemui para pemilihnya.

"Anggota DPRD ini berada di tengah dapil, mestinya dari sisi pengeluaran yang harus disiapkan DPRD sangat kecil," kata Lucius.

Kegiatan reses, kata Lucius, dinilai sudah cukup untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan tiga kali dalam setahun itu pun sudah memiliki anggaran yang berkisar Rp 300-350 juta. Apabila dirasa kurang untuk menyentuh masyarakat, Lucius menyebut sebaiknya para anggota Dewan dengan kesadaran sendiri membuat kunjungan ke daerah pemilihannya.

"Yang perlu bagi DPRD itu hanya kemauan untuk mengunjungi dapilnya, bukan soal tidak ada anggaran. Jadi

mengada-ada saja saya kira anggaran untuk kunjungan ke Dapil itu," tutur dia.

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp 49 miliar untuk kegiatan kunjungan dapil 106 anggota Dewan dalam rencana kerja tahunan (RKT) 2022.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan, Augustinus mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kunjungan dapil.

Anggaran tersebut akan digunakan oleh 106 anggota Dewan. Sehingga setiap anggota Dewan akan mendapatkan dana kunjungan sebesar Rp 38,4 juta untuk satu hari kunjungan setiap bulan. "Kurang lebih Rp 35-40 juta sebulannya. Jadi sebulan 4 miliar untuk 106 anggota dewan," tutur Augustinus. ● yan

Terlibat Kredit Fiktif Apartemen, 3 Pejabat Bank DKI Ditahan

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menahan dua petinggi bank DKI dan satu pihak swasta terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit kepemilikan apartemen KPA Tunai.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Bima Suprayoga didampingi Kasie

Intel, Bani Imanuel Ginting mengatakan bahwa jajarannya melakukan penahanan terhadap tiga tersangka. Dari ketiga yang ditahan, dua diantaranya merupakan pimpinan Bank DKI.

"Ketiga tersangka yang kita lakukan penahanan ini adalah berinisial RISE selaku dirut PT Brothbish asia yang kedua MT selaku pimpinan Bank DKI cabang pembantu Muara Angke, yang ketiga JPSE selaku pimpinan Bank DKI Cabang Permata Hijau," ucap Bima dikonfirmasi, Rabu (17/11).

Bima menyebut, penahanan itu dalam rangka pemberian fasilitas kredit KPA Tunai kepada bank DKI Cabang pembantu Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau kepada PT Brothbish tahun 2011-2017. Kasus ini disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp39 miliar lebih.

"Kami lakukan penahanan atas surat perintah Kejari Jakpus no 775/776 dan 777 tertanggal 16 November 2021," tegasnya.

Dalam kasus ini, Bima menerangkan ada setidaknya dua alat bukti terjadinya penyimpangan dalam proses

pemberian KPA Tunai bertahap kepada bank DKI cabang Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau.

Adapun penyimpangan tersebut meliputi pemalsuan data terhadap debitur. Dimana pada kenyataannya debitur tidak pernah mengajukan kredit ke bank DKI tersebut.

"Satu lagi kita temukan tidak adanya jaminan atas KPA Tunai bertahap yang telah dikurikan oleh bank DKI. Akibatnya kredit KPA Tunai bertahap menjadi macet, hal itu yang mengakibatkan kerugian," terangnya.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar primer pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 juncto pas 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah atau ditambah dengan UU no 20 tahun 2021 tentang perubahan UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Ketiganya kita tahan selama 20 hari terhitung saat ini hingga 20 hari kedepan. Tersangka RISW dan MT ditahan di Rutan Kelas 1 Salemba Jakpus dan JPSE ditahan di rutan kelas 1 Cipinang Jakarta timur," tutupnya. ● yan

Satgas Covid-19 Soroti Kenaikan Pemakaian Tempat Tidur di RSD Wisma Atlet

JAKARTA (IM) - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengingatkan bahwa kasus Covid-19 mulai meningkat.

Peningkatan terlihat dari keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran.

"Pada 6 November lalu kan jumlah pasien di Wisma Atlet 209 orang, tapi per 13 November kemarin jumlahnya di angka 273 orang," kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi dalam diskusi virtual, Rabu (17/11).

Sonny mengatakan, kenaikan pasien Covid-19 ini memang tidak terlalu signifikan. Namun, peningkatan ini harus diwaspadai agar tidak terjadi kenaikan yang lebih tajam.

"Ini menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan tindakan-tindakan, upaya-upaya sesegera mungkin agar tidak terjadi pelonjakan," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Barono Adisasmito mengatakan,

pasien Covid-19 yang menjalani perawatan di RSD Wisma Atlet Kemayoran konsisten meningkat dalam sepekan terakhir. Kenaikannya antara 248 hingga 273 orang.

"Padahal sebelumnya, keterisian tempat tidur di Wisma Atlet sudah berhasil ditekan hingga 209," kata Wiku.

Data hari ini, pasien Covid-19 yang menjalani rawat inap di tower 4, 5, 6 dan 7 RSD Wisma Atlet Kemayoran bertambah 14. Total pasien Covid-19 di rumah sakit yang terletak di Jakarta Pusat itu mencapai 229 orang.

"Jumlah pasien rawat inap 229 orang (112 pria, 117 wanita)," kata Kepala Penerimaan Kogabwilhan-I, Kolonel Marinir Aris Mudian, Rabu (17/11).

Beroperasi sejak 23 Maret 2020 hingga 17 November 2021, lanjut Aris, RSD Wisma Atlet Kemayoran merawat 129.073 pasien Covid-19. Tercatat 128.844 orang di antaranya sudah keluar.

Rincian pasien keluar yakni rujuk ke rumah sakit lain 1.043 orang, pasien telah sembuh 128.205 orang dan meninggal dunia 596 orang. ● yan

Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Kawal Kinerja Dinkes dan Disdik

CIKARANG PUSAT (IM) - Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rusdi Haryadi saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya, Selasa (16/11) mengatakan, saat ini pihaknya terus mengawal program-program kerja mitranya seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan.

Semenjak pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun berlangsung, kata Rusdi, berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 dan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran, dinas kesehatan tidak memerlukan persetujuan dewan.

Mungkin, sambung dia, niatnya untuk mempercepat proses. Oleh karena itu, kata dia lagi, anggaran harus tepat sasaran.

"Refocusing atau perubahan anggaran ke depannya diharapkan eksekutif



Sekretaris Komis IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi.

menjalinkan komunikasi yang baik dengan legislatif," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan.

Rusdi menambahkan, saat ini jum-

lah tenaga honorer pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi berada di angka 9000 orang.

Dewan, jelas Rusdi memastikan, mereka mendapat renumerasi yang memadai sehingga mereka ada peningkatan kinerja.

Dirinya melanjutkan, dewan juga melakukan pengawalan terkait rekrutmen pekerja honorer (non-ASN) yang dikontrak oleh pemerintah.

Pihaknya bersama dinas pendidikan, sambung Rusdi, sudah mengajukan sebanyak 1200 orang ke Pemerintah Pusat, tetapi saat ini yang sudah disetujui baru sebanyak 500 orang.

Ia berharap, Pemerintah Pusat ke depannya bisa merelisasikan sesuai usulan. "Pemerintah Pusat diharapkan bisa merealisasikan usulan karena, hal itu melihat kebutuhan real di lapangan," ujarnya berharap. (ADV)